

Peran Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Karawang

Muhammad Farhan Fathurohman¹, Usep Dayat², Rachmat Ramdani³

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: farhan.faturohman99@gmail.com , HP. 0895622175400

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Januari 2022

Direvisi: 19 Januari 2022

Dipublikasikan: Januari 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5919623

Abstract:

This study aims to identify and examine the role of local governments in alleviating extreme poverty zones in Karawang Regency. The theory used in this study is the role of government according to Siagian in Kuncoro (2004) which has four dimensional variables, including entrepreneurship, facilities, stimulus and coordinator. This study uses a qualitative descriptive method with data collection obtained through three ways or triangulation Sugiyono (2017). The results and discussion show that the role of the Karawang local government in alleviating extreme poverty which is reviewed through four dimensions is not optimal, where from the variable the role of entrepreneurs is still minimal work for the indigenous people of Karawang, the variable role of the coordinator is that there is no seriousness of the Karawang Regional Government in building good tourist destinations, the variable role of government facilities is also not considered optimal considering that there is still estrangement between the private sector and the community and the apathy shown by the local government of Karawang over the disintegrity problem, then the last variable of the role of the stimulus of the local government of Karawang only provides Karawang people who are in extreme poverty zones in the form of assistance. which is temporary and creates community dependence, not like assistance that can actually make the extreme poor of Karawang develop more advanced, such as communication training and entrepreneurship.

Keywords: *Government Role, Karawang, Extreme Poverty*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial klasik yang telah berlangsung lama didunia, sehingga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang harus dibasmi oleh seluruh negara, melalui hasil diskursus pembahasan yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) (Maarif, 2007).

Menurut Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studie dalam (Karunia, 2021) angka kemiskinan di Indonesia akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2022, yakni skitar 10.81% atau 29,3 juta penduduk.

Angka tersebut sangatlah besar mengingat pada tahun tahun sebelumnya kemiskinan sering menjadi momok bagi banyak masyarakat, diantaranya menurut Jonathan Haugthon dan Shadiur (2012, hal. 3) kemiskinan dapat menimbulkan permasalahan sosial baru berupa pencurian hingga tindakan kriminal lainnya, hal ini dikarenakan kebutuhan yang harus dicapai sangat sulit terealisasi bagi orang-orang yang secara perekonomian dikatakan masih mengalami kemiskinan.

Karawang sebagai salahsatu kabupaten di negara Indonesia merupakan salahsatu daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai zona ekstrim kemiskinan, dimana menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang dalam (Ramadhan, 2021) terdapat 108 ribu penduduk Karawang yang tersebar di 25 desa mengalami kemiskinan yang cukup memperhatikan.

Jika diukur melalui standar garis kemiskinan makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional maka 108 ribu penduduk Karawang tersebut memiliki potensi untuk terkena serangan gizi buruk, karena kurangnya asupan kalori yang ada dalam dirinya.

Potret kemiskinan ekstrim di Karawang sejatinya disebabkan oleh dua faktor yang menurut Suwadi (2013) adalah sebagai berikut

1. Prilaku masyarakat

Keterbatasan manusia dalam meningkatkan taraf ekonomi karena minimnya Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Karawang, sehingga pemerintah dalam hal ini melakukan dorongan berupa pemberian beasiswa agar IPM Karawang tidak berada di posisi bawah di Provinsi Jawa Barat, seperti yang terjadi pada sebelum tahun 2019

2. Pembangunan atau kebijakan pemerintah

Adanya ketimpangan antara pembagian kuota jatah pekerja bagi masyarakat pribumi Karawang dan pendatang, menjadikan sebagian masyarakat Karawang sulit menembus perusahaan yang ada di Karawang, terlebih Karawang yang dinobatkan sebagai Kota Industri akan menjadikan banyak pendatang yang mencari nafkah di Karawang. Selain itu, ketidakjelasan pembagian wilayah pertanian dan perindustrian menyebabkan masyarakat menjadi ambiguitas antara bertahan hidup melalui hasil tani atau masuk kedalam tataran industri.

Sebagaimana yang telah disinggung diatas, maka pemerintah daerah Karawang memiliki tugas wajib untuk berperan dalam mengentaskan fenomena kemiskinan ekstrim di Kabupaten Karawang. Hal ini sesuai dengan mandataris dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta lebih spesifik dimuat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa aparatur atau perangkat pemerintah dari tingkatan nasional sampai daerah memiliki kewajiban untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakatnya.

Peran pemerintah yang baik terhadap masyarakatnya menurut Sondang (2000, hal. 142-150) pemerintah harus bisa memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan melalui *stabilisator*, *innovator*, *modernisator*, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

Guna menempuh peran yang diharapkan tersebut, Pemerintah Daerah Karawang dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kaidah teoritis peran pemerintahan yang baik, sebagaimana menurut Siagian dalam (Kuncoro, 2004, hal. 113-114) bahwa peran pemerintah dapat diukur melalui empat indikator sebagai berikut

1. Wirausaha

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar

2. Koordiantor

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

4. Stimulator

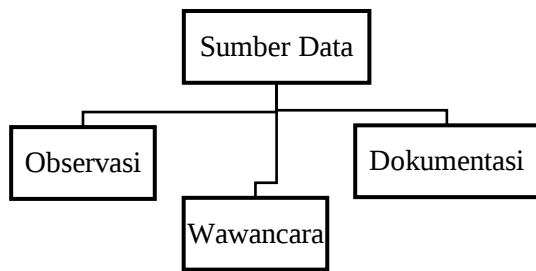
Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut.

Melalui ulasan diatas peneliti tertarik menjadikan kajian diskursus ilmu pemerintahan ini sebagai penelitian yang akan dimuat dalam jrnal dengan judul Peran Pemerintah Daerah Karawang dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Karawang.

METODOLOGI PENELITIAN

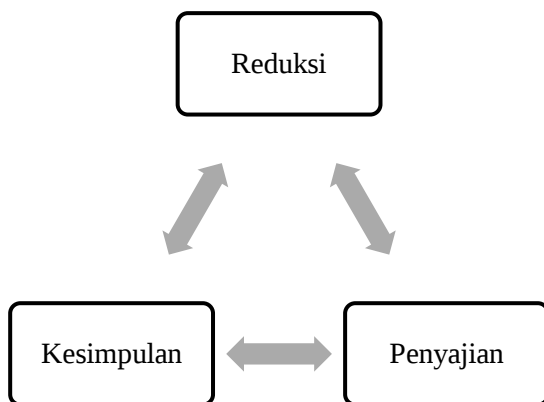
Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yakni sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar (Sugiyono, 2016)

Teknik pengambilan data dilalui melalui model tringulasi yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dillakukan dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diperoleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.



Gambar 1 Triangulasi Sumber Data Sugiyono

Setelah dilakukan pengambilan data, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan sesuai dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) yang diproses melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2 Model Analisis Data Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Siagian dalam (Kuncoro, 2004, hal. 113-114) yang didalamnya terdapat empat indikator utama dalam mengoptimalkan peran pemerintah Daerah Karawang dalam mengentaskan ekstrim kemiskinan di Kabupaten Karawang, adapun keempat indikator tersebut adalah wirausaha, koordinator, fasilitator dan stimulator. Adapun hasil penelitian dan pembahasan penulis yang disandingkan dengan teori adalah sebagai berikut

Peran Wirausaha

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar

Hasil temuan peneliti mengenai peran pemerintah daerah Karawang sebagai wirausaha, terbilang menemui hambatan dimana pemerintah Daerah Karawang masih belum mampu memaksimalkan peluang kerja bagi pribumi, sebagai contoh melalui peraturan Bupati yang hanya menaruh 60% pribumi Karawang di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Sejatinya peraturan tersebut akan mengalami perubahan namun dari pihak daerah I yakni Provinsi tidak mengizinkan.

Selanjutnya peluang mengenai adanya banyak industri belum mampu dioptimalkan dengan baik oleh pihak pemerintah daerah Karawang guna mengentaskan kemiskinan, peluang adanya industri justru lebih banyak dimanfaatkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengambil dana CSAR atau berkolanorasi dalam membangun mitra bisnis dengan swasta, seperti pada pengelolaan limbah-limbah pabrik.

Peran Pemerintah Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu

kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

Melalui hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kabupaten Karawang peran pemerintah tentang koordinator dalam mengentaskan ekstrim kemiskinan di Kabupaten Karawang masih menemui hambatan, berupa tidak maksimalnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang dalam meningkatkan eksistensi keunggulan budaya maupun tempat wisata di Karawang, seperti Candi Jiwa yang merupakan ornamen situs bersejarah namun belum tersentuh secara komprehensif sehingga belum banyak wisatawan lokal yang mengetahuinya.

Akibat daripada kurangnya peningkatan ekonomi melalui sumberdaya yang ada di Karawang, seperti pariwisata diatas maka menimbulkan stagnasi taraf ekonomi bagi masyarakat di area sekitar wilayah pariwisata tersebut.

Peran Pemerintah Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

Melalui hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kabupaten Karawang peran pemerintah tentang fasilitator dalam mengentaskan ekstrim kemiskinan di Kabupaten Karawang belum ditemukan hasil yang maksimal, hal ini dikarenakan masih adanya limbah pabrik yang mengalir ke area persawahan serta tidak adanya tanggapan pemerintah secara serius mengenai kerusakan ekosistem lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri.

Sebagai contoh adalah kegiatan penambangan PT Atlasindo yang terjadi di Kecamatan Loji, dimana Gunung Sanggabuwana mengalami kerusakan ekosistem yang dapat membahayakan mata pencaharian masyarakat sekitar. Banyak masyarakat melakukan tuntutan namun pemerintah daerah Karawang cenderung

apatis terhadap permasalahan ekologi yang diakibatkan oleh PT Atlasindo.

Peran Pemerintah Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut

Melalui hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kabupaten Karawang peran pemerintah tentang stimulator dalam mengentaskan ekstrim kemiskinan di Kabupaten Karawang belum ditemukan hasil yang maksimal, hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat di zona ekstrim kemiskinan hanya bersifat sementara, seperti pemberian uang atau makanan.

Bantuan yang sedemikian rupa secara tidak langsung menstimulus masyarakat untuk tidak mandiri, sehingga angka kemiskinan tetap sedemikian banyaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah terurai sebelumnya, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut, yaitu

1. Secara kewirausahaan peran pemerintah daerah Karawang dalam mengentaskan ekstrim kemiskinan belum dapat dikatakan optimal mengingat masih minimnya peluang kerja bagi masyarakat asli Karawang
2. Secara koordinator peran pemerintah daerah Karawang dalam mengentaskan ekstrim kemiskinan belum dapat dikatakan optimal karena masih minimnya keterlibatan secara aktif dari lembaga pemerintahan guna meningkatkan pamor destinasi wisata yang ada di Karawang
3. Secara fasilitator peran pemerintah daerah Karawang dalam mengentaskan ekstrim kemiskinan belum dapat

dikatakan optimal, hal ini disebabkan masih adanya ketidak harmonisannya pihak swasta dengan masyarakat Karawang serta sikap apatis dari pihak pemerintah terhadap fenomena tersebut.

4. Secara stimulator peran pemerintah daerah Karawang dalam mengentaskan ekstrim kemiskinan belum dapat dikatakan optimal dimana bantuan yang diberikan oleh Pemda Karawang terhadap masyarakat hanya bersifat sementara, sehingga secara tidak langsung dapat menstimulus ketergantungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah terurai sebelumnya, peneliti memberikan saran sebagai berikut

1. Secara kewirausahaan pemerintah sejatinya tidak hanya dapat menggerakkan aparatur pemerintahan saja, melainkan pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebagai contoh adalah pemanfaatan bisnis pengelolaan limbah yang baik yang dijalankan melalui sinergitas antara LSM dengan Pemda Karawang, dimana hasil dari bisnis ini dapat dikelola untuk memberikan hak UMKM bagi masyarakat yang masuk kedalam zona ekstrim kemiskinan.
2. Secara koordinator pemerintah daerah karawang harus mulai melirik bisnis wisata yang ada di Karawang, hal ini dikarenakan dapat membantu masyarakat disekitar untuk mencari mata pencaharian baru, seperti jualan, pembuat aksesoris dan juga *tourguide* bagi wisatawan. Tentu dalam hal ini pihak pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mengurangi akomodasi perawatan destinasi wisata tersebut.
3. Secara fasilitator pemerintah daerah Karawang harus memiliki ketegasan baik terhadap masyarakat juga

pihak swasta sehingga perselisihan diantara mereka dapat diminimalisir, yang kemudian dapat menjadikan hubungan harmonis diantara keduanya. Sinergitas yang harmonis diharapkan mampu menghantarkan lebih mudah masyarakat untuk bekerja di pihak swasta.

4. Secara stimulator pemerintah daerah karawang dapat melakukan perubahan gaya pemberian bantuan dari yang sifatnya sementara sehingga menimbulkan ketergantungan, menjadi mandiri. Seperti pembentukan pelatihan wirausaha bagi masyarakat yang terdata sebagai penduduk zona ekstrim kemiskinan di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Haugthon, J., & Shahidur, K. R. (2012). *Pedoman tentang. Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karunia, A. M. (2021, Desember 9). *Kompas.com/Money/WhatsNew*. Retrieved from Riset IDEAS: Angka Kemiskinan RI Melonjak di 2022: <https://money.kompas.com/read/2021/12/09/091539726/riset-ideas-angka-kemiskinan-ri-melonjak-di-2022?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Lembaga,setara%2029%2C3%20juta%20penduduk>.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Maarif, A. S. (2007). *Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan Inisiatif Di Tingkat Lokal*. Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity.

- Ramadhan, B. (2021, Oktober 25). *Republika/Home/Nusantara*. Retrieved from Bappeda Karawang: Kemiskinan Ekstrem Tersebar di Pedesaan: <https://republika.co.id/berita/r1ionm330/bappeda-karawang-kemiskinan-ekstrem-tersebar-di-pedesaan>
- Sondang, S. P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwadi, W. (2013). *Ekonomi Sumber Daya Dan Lingkungan*. Ponorogo.